

Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan di Desa Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan

Ratna Dewi, Zuherni AB, Fatimahsyam

Pendahuluan

Terlibatnya peran perempuan dalam *zona public* menandakan adanya demonstrasi pemikiran. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan sosial pada masyarakat, yang mana keterlibatan perempuan sudah ada dalam pembangunan. Dalam proses pembangunan, keterlibatan masyarakat memiliki peran serta dalam pembangunan. Pembangunan dalam berbagai macam bidang tentu perlu keterlibatan dari seluruh masyarakat yang tentunya harus saling mengisi dan melengkapi. Perempuan memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki, yaitu ikut serta dalam pembangunan desa.

Keterlibatan perempuan dalam pembangunan, perlu diperhatikan dan tingkatkan lagi. Keterlibatan perempuan sendiri dalam pembangunan yang ada di desa sangat diperlukan supaya tidak terjadinya ketimpangan gender terhadap pembangunan itu sendiri. Keikutsertaan perempuan dalam pembangunan di desa diharapkan mampu memberi nilai lebih terhadap hasil yang ingin dicapai. Pembangunan yang ada di desa pada dasarnya mengandung tiga unsur pokok utama yakni; pengambilan keputusan dalam perencanaan, mengikuti proses pelaksanaan pembangunan dan manfaat dari pembangunan tersebut.¹

Tujuan pembangunan itu sendiri adalah untuk mengarahkan kepada kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pembangunan diharapkan mampu memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat mampu

¹ Angelia E. Manebu, "Peran Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Suatu Studi Di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)", Jurnal Piltico, Vol.6, No. 1 (2017): hlm 5.

untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang ada di sekitarnya. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya untuk memperkuat kelembagaan masyarakat, agar mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan. Kemajuan merupakan proses masyarakat untuk menuju hasil yang ingin dicapai. Kemandirian merupakan proses mengajak masyarakat dalam mencapai hasil, sedangkan kesejahteraan merupakan memberi fasilitas masyarakat dalam mencapai hasil. Menurut konsep pemberdayaan Hikmat pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep kemandirian, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan lapisan masyarakat yang sekarang dalam kondisi yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap pemiskinan dan ketidakberdayaan.²

Pengabaian peran perempuan telah menempatkan posisi perempuan pada posisi yang lemah, misalnya dalam bidang pendidikan. Dalam hal pendidikan perempuan selalu lebih tertinggal dari pada laki-laki. Misalnya banyak masyarakat yang berpikir bahwa perempuan belum mampu untuk ikut dalam pembangunan. Juga budaya yang tidak berpihak, misalnya masyarakat lebih mengunggulkan laki-laki dalam hal apa pun dari pada perempuan, serta pemahaman tafsir agama yang cenderung bias gender, dalam hadis bukhari menjelaskan "Dari Abi Bakrah Tidak berjaya suatu masyarakat yang dipimpin oleh perempuan" (HR. Bukhari). sehingga semakin menjadikan perempuan tersudut dan memiliki posisi yang rentan. Peran perempuan dalam pembangunan desa sering kali diragukan karena dianggap tidak layak dan tidak mampu.

Peran perempuan dalam pembangunan merupakan hal yang penting. Karena keterlibatan perempuan dalam kelembagaan desa akan memunculkan kebijakan yang peduli terhadap pemenuhan kebutuhan perempuan. Kepentingan atau kebutuhan perempuan mungkin sangat berbeda dengan laki-laki. Kepentingan ini tidak didasarkan pada peran biologis perempuan dan laki-laki melainkan peran sosial dan kekuasaan

² Munggi Anggraeni Lestari, "Partisipasi Perempuan Dalam Proses Pemberdayaan Melalui PNPM Mandiri Perkotaan: Studi Kasus Di Desa Tanjungkarang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus," hlm 2.

mereka serta perbedaan status yang ada dalam peranan sosial. Berbicara tentang gender juga menyatakan secara tidak langsung perlunya keterlibatan laki-laki untuk memahami dan mendukung perubahan dalam hubungan gender, yang akan menciptakan keseimbangan yang lebih adil dan setara antar laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.³

Membicarakan peran perempuan juga terkait dengan adanya sistem sosial patriarki. Adat serta budaya menjadi landasan bagi masyarakat berperilaku sehari-hari yang mana diturunkan dari kebudayaan. Sehingga masih adanya pembatasan terhadap perempuan yang diawali dari stereotip subordinasi. Perempuan berada di sektor domestik dan laki-laki berada di sektor publik. Padahal dilihat dari aspek hukum adat yang ada di Aceh, perempuan dipandang sebagai *subjectum iudis* (badan hukum) yang memiliki hak hukum pribadi. Sehingga mempunyai kecakapan berhak dan memiliki kecakapan bertindak. Sehingga dalam perencanaan sebuah pembangunan juga memiliki peran penting di dalamnya. Artinya perempuan memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam kesempatan ini.⁴

Melly G. Tan dalam jurnal *Hunia Djumaiti* dkk, mengatakan bahwa peranan wanita dalam pembangunan mengandung dua pengertian; (1) pembangunan memberi kemudahan bagi kaum wanita untuk ikut berupaya meningkatkan diri dan keluarganya. (2) pembangunan memberi kemudahan bagi kaum wanita untuk menyalurkan tenaga, keterampilan, pikiran dan keahliannya dalam proses pembangunan.⁵

Fauzi Abubakar dalam jurnal "Peran Perempuan Dalam Tuha Peut: Lembaga Adat Dan Pemerintahan Gampong Di Aceh" mengatakan bahwa peran perempuan dalam lembaga *Tuha Peut* setara dengan laki-laki, bahkan sangat penting. Seperti pada kasus-kasus sengketa yang terjadi dalam masyarakat, keterampilan perempuan sebagai mediator

³ Julia Cleves Mosse, *Gender Dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm 9.

⁴ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1995), hlm 121.

⁵ Hunia Djumaiti, Wilson Y. Rompas, A. J. Rorong, Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vo.1 No.2 (2015). hlm 4.

dan negosiator sangat menentukan dalam penyelesaian perkara tersebut. Begitu juga peran perempuan dalam pelestarian adat istiadat, seperti dalam pelaksanaan adat perkawinan di Aceh kaum perempuan yang mengatur pelaksanaannya. Sedangkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, perempuan juga terlibat dalam perumusan kebijakan Gampong seperti membuat peraturan Gampong (reusam). Di sinilah perempuan mempunyai peran dalam mewujudkan kebijakan yang berkeadilan gender.⁶

Pembangunan perdesaan dalam konteks pemberdayaan masyarakat untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan agar terbentuk dan terciptanya masyarakat yang madani. Pada prosesnya harus melibatkan dan keikutsertaan seluruh masyarakat yang ada di desa sebagai faktor penggerak. Kunci pelaksanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan optimal adalah dengan memanfaatkan seluruh sumber daya lokal yang ada di desa, sumber daya manusia juga harus termanfaatkan dengan baik, dengan tidak memandang bias gender sebagai pemisah antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan.⁷

Perempuan juga memiliki hak yang sama untuk ikut terlibat dalam sebuah perencanaan dalam pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau aparat desa. Perempuan juga dapat ikut serta dalam melaksanakan dan mengawasi pembangunan. Hal ini dilihat dari kewenangan Undang-undang Permendesa sebagai dasar dan kuasa untuk pembangunan serta untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Desa Kedai Kandang sendiri perempuan juga berpartisipasi dalam hal kegiatan seperti Perangkat Desa, PKK, Posyandu, Koperasi desa, Keagamaan, Musyawarah tentang desa dan PAUD.

Artikel ini memfokuskan kepada keterlibatan perempuan dalam pembangunan di desa Kedai Kandang. Artikel ini juga ingin melihat apa faktor pendukung dan terhambatnya keterlibatan perempuan dalam

⁶ Fauzi Abubakar, *Peran Perempuan Dalam Tuha Peut: Lembaga Adat dan Pemerintahan Gampong Di Aceh*. Lhokseumawe: Jurnal *Al-Tahrir*, Vol. 15, No. 2 November 2015. hlm 331 – 348.

⁷ Tuti Kurniati, "Peran Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan batu Selatan," <http://repository.uinsu.ac.id/> (2018), hlm 4.

pembangunan. Dengan meninjau sejumlah publikasi terkait dalam jurnal dan referensi lain yang relevan, penulis meninjau bahwa kenyataan yang diperlihatkan dalam masyarakat adanya perbedaan makna gender antara perempuan dan laki-laki yang dalam ranah politik, sehingga perempuan bisa dikatakan lebih tertinggal daripada laki-laki. Artikel ini menggunakan metode kepustakaan dengan mengambil data dari referensi yang relevan seperti jurnal, artikel ilmiah, dan buku.

Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan isu penting yang tidak pernah berhenti dibahas baik di negara terbelakang, negara berkembang, sampai dengan negara maju. Walaupun konteks yang dibicarakan dan cara yang digunakan berbeda, akan tetapi pada dasarnya tujuan yang diharapkan semua sama, yakni membawa negaranya dari keadaan saat ini menuju keadaan yang lebih baik. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan sangat lah penting dan menentukan maju tidaknya sebuah desa. Menurut Ginanjar Kartasasmita pembangunan memang dapat juga berjalan dengan mengandalkan kekuatan yang ada pada pemerintah. Namun hasilnya tidak akan sama jika dibandingkan dengan pembangunan yang mendapat dukungan dan partisipasi rakyat, karna partisipasi masyarakat tersebut sangat penting.⁸

Pembangunan adalah segala upaya untuk mewujudkan perubahan sosial dari suatu keadaan kehidupan menuju keadaan baru yang lebih baik. Perubahan sosial tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan dan berlangsung secara terus menerus. Pembangunan desa di definisikan sebagai pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Pembangunan desa pada dasarnya merupakan kegiatan terencana yang mengandung tiga unsur pokok yakni: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Metode pembangunan desa yang baik harus melibatkan seluruh anggota

⁸ Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak, "Gender And Politics: Keterlibatan Perempuan Dalam Pembangunan Politik", *Jurnal Studi Gender*, Vol.12 No. 3 (2017): hlm. 410

masyarakat dan menyangkut kegiatan yang berkaitan langsung dengan kepentingan sosial dan ekonomi mereka. Sebagai proses, pembangunan merupakan suatu transformasi budaya yang diawali dengan kehidupan tradisional yang mengandalkan kebiasaan turun temurun untuk di ubah menjadi masyarakat yang mempunyai taraf hidup yang baik, serta menciptakan kesempatan yang lebih baik lagi bagi desa. Dengan tujuan itu pembangunan desa juga diharapkan dapat menjadi pembangunan yang berwawasan masa depan dan berkelanjutan.⁹

Dalam jurnal yang berjudul "Identifikasi Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Desa Kabupaten Aceh Barat". Kebijakan Pembangunan perdesaan tahun 2010-2014 diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat perdesaan dengan langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya produktif untuk pengembangan usaha seperti lahan, prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi dan inovasi, serta akses masyarakat ke pelayanan publik dan pasar. Kedua, meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui peningkatan kualitasnya, dan penguatan kelembagaan serta modal sosial masyarakat perdesaan berupa jaringan kerja sama untuk memperkuat posisi tawar. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan memenuhi hak-hak dasar. Keempat, terciptanya lapangan kerja berkualitas di pedesaan, khususnya lapangan kerja non pemerintah¹⁰.

Dalam jurnal yang berjudul "Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pembangunan Aceh Pasca konflik." Dalam hal partisipasi politik perempuan dalam perencanaan, ada tiga hal menurut penulis mengapa perempuan masih rendah partisipasinya dalam perencanaan di Aceh. Pertama, karakter Aceh yang khas menganut sistem patriakal, seakan-akan membatasi gerak perempuan untuk lebih jauh dalam politik, meskipun sejarah masa lampau tidak demikian. Kedua, pola interaksi antarwarga masyarakat perempuan yang tidak intensif dan tidak memiliki kemampuan untuk membangun relasi dengan pimpinan

⁹ Ibid. Hlm 5.

¹⁰ Nellis Mardhiah, "Identifikasi Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Desa Kabupaten Aceh Barat", Jurnal Publik Policy. hlm 88.

daerah sehingga mempengaruhi peluang partisipasi politik perempuan. Ketiga, tingkat kemampuan SDM perempuan dalam mengorganisir kelompok perempuan sendiri dan mendorong kelompoknya untuk sama-sama mengadvokasi agar dapat terlibat dalam proses perencanaan yang merupakan entri poin dalam pelaksanaan pembangunan. Sehingga wajar saja kemudian ada pihak yang mengklaim bahwa perempuan belum fokus dalam memperjuangkan hak-haknya dan belum memiliki kemampuan dalam mengorganisir dirinya sebagai subjek dan objek dalam pembangunan.¹¹

Dalam jurnal yang berjudul "Tuha Peut Perempuan : Peluang Dan Diferensiasi Sosial Pembangunan Gampong Di Aceh". Pada dekade 90-an, keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan kelembagaan gampong belum tersentuh sama sekali secara hukum formal. Artinya, proses keterlibatan perempuan tidak terlepas seiring dengan dinamika politik di Aceh pasca konflik dan Tsunami yang melibatkan berbagai pihak donor dan lembaga swadaya masyarakat agar perempuan dilibatkan dalam berbagai proses rekonstruksi dan rehabilitasi pasca konflik dan Tsunami di Aceh. Ini adalah sebagai bentuk kepedulian elemen masyarakat dalam upaya memosisikan perempuan sebagai pelaku pembangunan dan bukan menjadi obyek dari pembangunan itu sendiri. Hal dapat dipahami mengingat perempuanlah yang lebih banyak menjadi korban pada masa konflik dan Tsunami.¹²

Salah satu asumsi kunci yang mendasari analisis gender dan pembangunan adalah laki-laki dan perempuan, karena mereka memiliki peran dan kekuasaan yang berbeda. Jika mereka yang merencanakan proyek dan program mampu memahami dengan baik kepentingan gender. Perempuan akan berada dalam posisi jauh lebih baik untuk memastikan bahwa kebutuhannya terpenuhi. Kepentingan gender mengakui kenyataan bahwa kepentingan perempuan individu

¹¹ Cut Asmaul Husna, "Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pembangunan Aceh Pasca konflik", Jurnal Publik Policy, Vol 1, hlm 88.

¹² Mahmuddin, "Tuha Peut Perempuan : Peluang Dan Diferensiasi Sosial Pembangunan Gampong Di Aceh", Jurnal Perawi. Vol 1, 2019, hlm 51.

boleh jadi banyak ditentukan oleh posisi sosial dan identitas etnisnya sebanyak kenyataan bahwa dia adalah seorang perempuan.¹³

Julia Cleves Mosse mengatakan definisi kepentingan dan kebutuhan gender strategis berkaitan dengan perubahan jangka panjang. Definisi tersebut juga merupakan pusat dari sekumpulan gagasan dan kecemasan tentang peranan donor, dan pihak donor, baik bilateral maupun NGO, guna mencapai kebijakan yang mungkin menghasilkan perubahan struktural politik gender dalam masyarakat.

Kepentingan gender strategis adalah kepentingan yang berasal dari suatu analisa mengenai subordinasi perempuan. Kepentingan itu menunjuk kepada organisasi masyarakat alternatif yang lebih adil dan lebih memuaskan berkenaan dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, identifikasi kepentingan gender strategis perempuan merupakan bagian dari strategi feminis yang ditujukan untuk mengubah hubungan kekuasaan yang ada antara laki-laki dan perempuan yang menyusun semua kawasan kehidupan keluarga, pendidikan, kesejahteraan, dunia kerja dan politik¹⁴.

Struktur patriarki yang dominan sebagian masyarakat tidak melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam meningkatkan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan, masih menghadapi banyak sekali tantangan. Masyarakat cenderung memandang perempuan sebagai masyarakat kelas dua. Laki-lakilah yang berkomunikasi dengan dunia luar. Pengenalan teknologi baru, program pendidikan, peralatan baru dan jasa yang beraneka ragam. Secara implisit melembagakan dominasi laki-laki atas perempuan karena pengetahuan dan mempertinggi kekuasaan laki-laki. Faktor sosial budaya masyarakat dan orang tua yang cenderung menggunakan tenaga anak perempuan untuk membantu urusan rumah tangga sering berakibat pada rendahnya kinerja akademik bahkan putus sekolah. Adanya pemikiran bahwa menyekolahkan anak perempuan merupakan investasi yang sia-sia.

¹³ Mandy Macdonald, dkk. Gender dan Perubahan Organisasi Menjembatangi Kesenjangan Antara Kebijakan dan Pratik, INSIT Juli 1999. hlm 47.

¹⁴ Julia Cleves Mosse, Gender dan Pembangunan, Yogyakarta, 2007 hal 216

Dengan adanya kendala tersebut sangat sulit bagi perempuan untuk memberi masukan dalam pengambilan keputusan.

Dalam berbagai kajian, ditemukan bahwa masalah kemiskinan tidak saja mengenai masalah ketidakadilan sosial ekonomi, tetapi juga masalah kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Atas dasar itulah, isu kemiskinan kemudian diperluas, tidak sekedar persoalan teknis atau ekonomi. Dalam program pengentasan kemiskinan, perempuan ditempatkan sebagai subjek sekaligus objek dalam rangka meningkatkan kemampuan, peranan, dan kedudukannya sebagai penyangga penghidupan dan kehidupan keluarga serta berperan dalam berbagai usaha kesejahteraan sosial. Kesenjangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan juga dipengaruhi oleh faktor sosial budaya. Kesenjangan partisipasi menurut jenis kelamin, baik program pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi, keluarga fakir miskin, maupun pemberdayaan anak terlantar lebih banyak dipengaruhi faktor sosial budaya yang berkembang di masyarakat antara lain nilai dan sikap yang dianut oleh sebagian besar warga masyarakat. Laki-laki masih dianggap sebagai penopang ekonomi keluarga dan pengambil keputusan, sedangkan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Padahal jumlah perempuan sebagai kepala rumah tangga juga menunjukkan angka yang tinggi. Perempuan sebagai pribadi memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kapasitas terutama dalam peningkatan kesejahteraan sosialnya.¹⁵

Terselenggaranya pembangunan di desa tidaklah lepas dari partisipasi atau keterlibatan masyarakat yang didasarkan atas keyakinan dan kesadaran yang datang dari dalam dirinya sendiri, sehingga memungkinkan masyarakat memiliki rasa tanggung jawab terhadap daerahnya. Pembangunan desa dapat terpenuhi sesuai dengan apa yang dicita-citakan diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang bersumber pada prinsip dasar pembangunan daerah yaitu dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Oleh karena hal tersebut diperlukan kemampuan masyarakat untuk mengenali dan memecahkan segala permasalahan yang ada di dalam wilayah tersebut serta dapat

¹⁵ Ratih Probosiwi, "Perempuan Dan Perannya Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Women And Its Role On Social Welfare Development)" jurnal kajian ilmu administrasi negara vol. 3 no 1 (2015) hal. 51

menggali potensi-potensi yang ada untuk selanjutnya dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada dasarnya tampak terlihat mulai dari merencanakan, pengambilan keputusan, pelaksanaannya dan bahkan sampai pada pengawasan serta menilai hasil pembangunan dan juga memelihara hasil yang telah dicapai. Penyaluran aspirasi dan inspirasi masyarakat dilakukan melalui rapat ataupun pertemuan yang pada akhirnya terwujud dalam suatu keputusan, yang selanjutnya akan dijabarkan melalui suatu program. Dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat harus ikut serta, sebab pelaksanaan pembangunan tidak akan berjalan dengan baik dan lancar apabila tidak didukung oleh adanya partisipasi dari masyarakat. Tingginya tingkat kesadaran dan sikap masyarakat terhadap pembangunan, maka perubahan menuju pada arah kemajuan dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan menjadi landasan pembangunan berikutnya, sehingga hasil-hasil pembangunan yang dicapai pun tinggi. Dana yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan terhadap program/proyek pembangunan adalah dana swadaya murni masyarakat.¹⁶

Ada beberapa faktor yang dapat mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam suatu program, Timbulnya partisipasi merupakan ekspresi perilaku manusia untuk melakukan suatu tindakan, di mana perwujudan dari perilaku tersebut didorong oleh adanya tiga faktor utama yang mendukung, yaitu (1) kemauan; (2) kemampuan; dan (3) kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi). Selain itu ada juga faktor yang menghambat partisipasi masyarakat menurut Watson mengatakan bahwa ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan antara lain kendala yang berasal dari kepribadian individu salah satunya adalah ketergantungan. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan hambatan dalam mewujudkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat secara aktif, karena rasa ketergantungan ini masyarakat

¹⁶ Juliana Lumintang, "Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Kemajuan Pembangunan Masyarakat Di Desa Tara-Tara I, " *e-journal acta diurna* Vol. 4 No.2. Tahun 2015, hlm. 7.

tidak memiliki inisiatif untuk melaksanakan pembangunan atau prakarsa mereka sendiri.¹⁷

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Pedesaan akan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap suksesnya program yang telah ditentukan. Optimalisasi peran masyarakat menjadi solusi agar dalam merencanakan pengelolaan dana desa untuk pembangunan dapat berjalan maksimal, sehingga mandat UU Desa dapat terwujud dengan menjadikan desa- desa mandiri dan memiliki daya saing.

Keterlibatan perempuan dalam pembangunan Desa

Setiap pembangunan seharusnya melibatkan kaum perempuan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus utamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Program kesetaraan dan keadilan gender tercantum sebagai salah satu strategi untuk mengoptimalisasi peran perempuan Indonesia. Implementasi PUG disampaikan kepada Departemen maupun Lembaga Pemerintah dan non Departemen serta Pemerintah Daerah (Pemda) seluruh Indonesia, untuk menjalankan penyusunan program dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan permasalahan kebutuhan, aspirasi perempuan pada pembangunan dalam kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan instruksi Presiden tersebut perempuan dalam setiap perencanaan program pembangunan desa dengan alokasi dana desa dapat menjadi pedoman bagi setiap pemerintahan desa untuk melibatkan para perempuan.¹⁸

Untuk melihat keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa, dapat dilihat dari tahapan pembangunan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa.

¹⁷ Ibid. Hal 384.

¹⁸ Titi Darmi, "Optimalisasi Peran Perempuan Berbasis Modal Sosial Pada Sektor Pemerintahan Desa (Study Pada Pengelolaan Dana Desa)," *jurnal antropologi*, Vol. 18 No. 1 (2016): Hal. 23

Keterlibatan Perempuan dalam Proses Perencanaan Pembangunan

Bentuk keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan diharapkan perempuan lebih ikut berpartisipasi. Perempuan tidak hanya sekedar menyampaikan usulan kegiatan pembangunan. Tetapi mereka juga harus bisa melihat, memahami serta mampu memberikan jawaban atas persoalan yang ada. Dalam hal ini masyarakat diharapkan dapat mengamati, memilih, menafsirkan, memahami berbagai jenis informasi yang diterimanya untuk kemudian dilaksanakan dalam bentuk tindakan. Sehingga mereka dapat mengetahui apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan dan mampu menentukan serta merumuskan prioritas program yang perlu dilaksanakan didasarkan atas potensi dan permasalahan yang dimiliki.

Perencanaan pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Jika melihat dari dua proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa (RPJM dan APB), kegiatan perencanaan desa sangat tergantung pada kesepakatan melalui musyawarah desa dan Musrembang desa. Dengan melibatkan semua keterwakilan masyarakat desa, serta perempuan. Partisipasi perempuan dalam tahap perencanaan desa di Kedai Kandang masih terbilang kurang. Perempuan kurang dilibatkan sejak di Musrembang dusun, sampai di Musrembang desa.

Maka, untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, kiranya desa harus melakukan upaya pemberdayaan perempuan melalui meningkatkan keterlibatan perempuan. Untuk meningkatkan peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan di semua tahapan pembangunan. Juga diperlukan adanya penguatan kelembagaan desa juga penting dilakukan dalam rangka meningkatkan keadilan gender ke dalam seluruh proses pembangunan di tingkat desa.

Berdasarkan hasil wawancara, seperti yang telah diuraikan terlihat bahwa pihak aparat desa kurang memberikan peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan serta kesadaran perempuan sendiri perlunya keterlibatan mereka masih kurang. Juga waktu musyawarah desa selalu dilaksanakan

malam hari sehingga sebagian perempuan tidak bisa hadir dalam musyawarah tersebut. Pemilihan waktu musyawarah tersebut juga menyesuaikan dengan aktivitas masyarakat lain yang bekerja disiang hari. Sehingga dalam realisasinya usulan pembangunan yang dikumpulkan dari tiap musyawarah kebanyakan hanya inisiatif dari para aparat desa bukan berdasarkan musyawarah yang dilakukan.¹⁹

Adapun hasil wawancara lainnya juga mengatakan pada tahap perencana proses pembangunan dan penyerapan aspirasi perempuan masih kurang terlibatkan. Karena disebabkan budaya patriarki yang mana lebih memprioritaskan laki-laki. Sehingga muncullah kurang percaya dirinya perempuan. Karena mereka selalu berpikir apa pun yang mereka sampai kan itu percuma yang mana nantinya tidak akan didengarkan, meskipun apa yang mereka katakan adalah kebenaran. Kemauan dari perempuan sendiri untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan masih sangat kurang. ²⁰ Perencanaan dalam pembangunan adalah sebuah proses awal dari kegiatan yang akan dilakukan.

Keterlibatan Perempuan dalam Pelaksanaan Pembangunan

Bentuk keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bukan hanya keterlibatan secara emosional semata tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang bisa berupa uang dan tenaga yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan. Dalam tahapan pelaksanaan pembangunan, kepala desa mengatur pembangunan yang dilaksanakan oleh aparat desa dan partisipasi masyarakat desa.

Pemerintah desa di Aceh dalam melaksanakan pembangunan desa, terutama di bidang pembangunan infrastruktur, aparat desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari aparat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan melibatkan masyarakat desa. Juga adanya BPD sebagai koordinator pengawas pelaksana kegiatan. Pembentukan TPK merupakan suatu upaya peningkatan

¹⁹Wawancara Telepon "Tiska" Masyarakat, 24 Junu, 14:20 WIB

²⁰ Wawancara Telpon "E", IRT, 24 Juni 2020, 13.50 WIB

partisipasi masyarakat dalam bentuk prakarsa, swadaya dan gotong royong dalam proses pembangunan sarana dan prasarana desa. sehingga diharapkan timbul suatu gerakan masyarakat di desa untuk membangun, meningkatkan pemberdayaan, memperluas kesempatan kerja, kemandirian serta kesejahteraan.²¹

Unsur pembentukan TPK di Aceh yang bersifat infrastruktur tidak melibatkan perempuan di dalamnya. Penyebabnya adalah masyarakat beranggapan bahwa pekerjaan TPK itu sangat susah dan juga berat. Karena tugas TPK yaitu mengurus segala pekerjaan pembangunan yang bersifat infrastruktur. Sedangkan dalam pemberdayaan dan pembinaan masyarakat keterlibatan perempuan sangat aktif dan baik.

Berdasarkan hasil wawancara pelaksanaan program pembangunan di desa Kedai Kandang pembangunan dalam bidang fisik dan pemberdayaan sudah ada. Pembangunan bidang fisik yang dilaksanakan oleh aparatur desa dan masyarakat yang dananya bersumber dari anggaran yang telah diberikan oleh pihak pemerintah. Keterlibatan perempuan bidang infrastruktur melalui dukungan pelaksanaan pembangunan bidang fisik diwujudkan masyarakat melalui dukungan mereka terhadap setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di lingkungan sekitar mereka. Sedangkan untuk pelaksanaan pembangunan yang bersifat pemberdayaan mereka berperan aktif di dalamnya. Sisanya ada juga yang tidak bisa berpartisipasi dikarenakan kesibukan pekerjaan mereka sendiri.²²

Keterlibatan Perempuan dalam Evaluasi Pembangunan

Keterlibatan perempuan perlu dalam melakukan evaluasi yang meliputi pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Pengawasan dan pemantauan pembangunan desa menjadi dasar pembahasan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Pemantauan pembangunan desa oleh masyarakat desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan desa. Pemantauan tahapan perencanaan dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM.

²¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

²² Wisja, Kasi Pemberdayaan Perempuan, Telpon, 25 Juni 2020, 14:20 WIB

Sedangkan pemantauan tahapan pelaksanaan dilakukan dengan cara menilai antara lain: persiapan jasa orang yang akan bekerja, persiapan bahan, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan desa.

Partisipasi perempuan dalam tahapan evaluasi pembangunan desa sangat terbuka lebar, baik dalam menilai dokumen perencanaan maupun hasil pelaksanaan pembangunan desa. Karena laporan penanggung jawab (LPJ) desa disampaikan dalam bentuk ikatan musyawarah. Kegiatan musyawarah tersebut pemerintah desa mengundang semua keterwakilan unsur masyarakat. Partisipasi perempuan di Desa Kedai dalam musyawarah membahas LPJ sangat minim. Hal ini disebabkan karena agenda musyawarahnya sering diadakan malam hari serta perempuan juga sering tidak diundang dalam musyawarah.

Hasil pembangunan yang tercapai dapat dilihat dari berhasil apa tidaknya pembangunan tersebut. Apabila dalam penilaian orang banyak dianggap baik dan dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan kesejahteraan masyarakat banyak. Seharusnya masyarakat di Desa Kedai Kandang dapat ikut serta dalam menilai hasil pembangunan yang ada sehingga apabila ada suatu pembangunan yang memang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat pihak pemerintah dapat mengetahuinya dan sebagai acuan untuk penyusunan program pembangunan selanjutnya.

Keterlibatan masyarakat dalam hal mengevaluasi hasil pembangunan yang ada di Desa Kedai Kandang sudah ada. Ketika di dalam partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masyarakat sudah mampu menilai suatu kondisi yang ada di lingkungan mereka masing-masing dengan ikut terlibat dalam mengajukan usulan pembangunan. Juga ketika di dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang diwujudkan dalam kegiatan gotong royong secara tidak langsung masyarakat sudah ikut terlibat dalam hal menilai dari hasil pembangunan yang ada dan ikut mengawasi jalannya suatu pembangunan tersebut. Dengan adanya keterlibatan mereka, mereka merasa dilibatkan untuk memiliki hasil pembangunan tersebut, dengan adanya keterlibatan anggota masyarakat terhadap apa yang dihasilkan

melalui evaluasi suatu pembangunan merupakan indikasi dari berhasilnya pembangunan tersebut dan hal ini tentunya.²³

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam proses pembangunan yang ada di desa yaitu :

Faktor yang Mendukung Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Timbulnya partisipasi merupakan kesadaran dari perempuan itu sendiri untuk melakukan suatu tindakan untuk terlibat di dalam suatu kegiatan pelaksanaan pembangunan perwujudan dari perilaku tersebut didorong oleh adanya faktor utama yang mendukung, yaitu kemauan. Kemauan dari diri perempuan itulah yang sebenarnya mendorong dia untuk dapat terlibat suatu kegiatan pembangunan. Apalagi kegiatan pembangunan tersebut merupakan kebutuhan dan menjadi prioritas mereka sebagai masyarakat desa itu sendiri. Sehingga mereka tergerak untuk terlibat di dalam kegiatan pembangunan tersebut.

Juga ada kemampuan yang harus dimiliki perempuan. Hal ini sangat membantu perempuan dalam keterlibatannya dalam sebuah pembangunan. Selain itu kesempatan yang diberikan kepada mereka untuk berpartisipasi.

Faktor yang Menghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Kurangnya perhatian aparaturnya dalam melibatkan perempuan dalam proses perencanaan. Sehingga perempuan sendiri tidak memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam acara atau musyawarah di desa. Juga pengetahuan dan wawasan masyarakat yang masih terbatas merupakan hambatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu masyarakat pada umumnya kurang memahami peran serta mereka dalam pembangunan, hal ini menyebabkan kesadaran mereka terhadap pembangunan kurang optimal karena mereka menganggap bahwa pembangunan merupakan tugas dan tanggung jawab aparaturnya desa saja. Padahal untuk mewujudkan pembangunan peran serta masyarakat secara aktif sangat diperlukan sebab tujuan akhir dari pembangunan adalah untuk rakyat dan partisipasi mereka sangat diperlukan untuk mewujudkannya. Serta

²³ Safrizal, Kepala Desa, Telpon, 26 Juni 2020, 13:50 WIB

ketersediaan waktu untuk turut berpartisipasi sangat kurang, hal ini juga merupakan kendala yang ada dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Selain itu juga kurangnya sosialisasi dari lembaga baik pemerintah maupun swasta kepada masyarakat ketika akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut pembangunan di bidang fisik, sehingga masyarakat kurang terlibat di dalamnya.

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas penulis menarik kesimpulan mengenai keterlibatan perempuan dalam pembangunan di desa Kedai Kandang Kluet Selatan Aceh Selatan. Keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa Kedai Kandang masih kurang, hal ini penulis melihat masih sedikitnya jumlah perempuan yang terlibat dalam pembangunan. Sedikitnya jumlah perempuan dalam pembangunan dikarenakan adanya masalah atau hambatan bagi perempuan. Artikel ini melihat permasalahan yang dialami perempuan adalah masyarakat lebih memprioritaskan laki-laki dalam kegiatan pembangunan. Adanya budaya patriarki yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat ikut menjadi salah satu faktor kurangnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa. Pemahaman yang diberikan masyarakat bahwa mengedepankan laki-laki dalam pembangunan menjadi ketetapan dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman tersebut pada akhirnya suatu masalah bagi perempuan untuk ikut terlibat dalam pembangunan.

Dalam tiga tahapan pembangunan yaitu, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan keterlibatan perempuan masih sangat sedikit. Pada saat pelaksanaan pembangunan yang bersifat infrastruktur perempuan sangat sulit mendapat peran sebagai Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK). Namun dalam pelaksanaannya partisipasi perempuan sudah ada. Apalagi dibidang pemberdayaan partisipasi perempuan sudah sangat bagus, seperti kegiatan Posyandu, PKK dan berbagai pemberdayaan lain. Perempuan juga sering dilibatkan sebagai panitia dan peserta kegiatan tersebut. Partisipasi perempuan dalam tahapan evaluasi pembangunan desa sangat terbuka lebar, Sebaliknya

partisipasi perempuan di desa Kedai Kandang dalam musyawarah desa membahas LPJ sangat kurang. Hal ini disebabkan karena agenda musyawarahnya sering diadakan malam hari serta perempuan juga kerap tidak diundang dalam musyawarah tersebut.

Dalam keterlibatan perempuan sebenarnya faktor yang paling mendukung adalah kemauan perempuan itu sendiri untuk ikut berpartisipasi. Selain itu juga perlu kemampuan yang dimiliki perempuan serta adanya kesempatan yang diberikan kepada mereka untuk berpartisipasi. Membuat perempuan terlibat dalam pembangunan tidak lah mudah ada juga beberapa kendalanya. Kurangnya perhatian aparatur dalam melibatkan perempuan dalam proses perencanaan. Sehingga perempuan sendiri tidak memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam acara atau musyawarah di desa. Juga pengetahuan dan wawasan masyarakat yang masih terbatas merupakan hambatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu masyarakat pada umumnya kurang memahami peran serta mereka dalam pembangunan, hal ini menyebabkan kesadaran mereka terhadap pembangunan kurang optimal karena mereka menganggap bahwa pembangunan merupakan tugas dan tanggung jawab aparatur desa saja. Padahal untuk mewujudkan pembangunan peran serta masyarakat secara aktif sangat diperlukan sebab tujuan akhir dari pembangunan adalah untuk rakyat dan partisipasi mereka sangat diperlukan untuk mewujudkannya. Serta ketersediaan waktu untuk turut berpartisipasi sangat kurang, hal ini juga merupakan kendala yang ada dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Selain itu juga kurangnya sosialisasi dari lembaga baik pemerintah maupun swasta kepada masyarakat ketika akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut pembangunan di bidang fisik, sehingga masyarakat kurang terlibat di dalamnya.

Daftar Pustaka

- Angelia E. Manembu, Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Suatu Studi Di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara), *Journal Piltico*, Vol. 6, No. 1 (2017).
- Alfirahmi Alfirahmi dan Retno Ekasari, Kontruksi Realitas Sosial Perempuan Tentang Gender Dalam Pembentukan Karakteristik Anak Terhadap Pemahaman Gender, *Mediakom : Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, No. 2 (2018).
- Benny Ferdy Malonda, Peranan Perempuan Dan Pembangunan Di Indonesia, *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, Vol. 22, No. 3 (2009).
- Cut Asmaul Husna, Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pembangunan Aceh Pasca Konflik, *Jurnal Publik Policy* Vol 1.
- Dea Deviyanti , Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah *eJournal Administrasi Negara*, Vol.1, No. 2, (2013).
- Fauzi Abubakar, Peran Perempuan dalam Tuha Peut: Lembaga Adat dan Pemerintahan Gampong di Aceh. Lhokseumawe: *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 15, No. 2 November 2015.
- Hunia Djumati, dkk, Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vo. 1 No. 2 (2015).
- Juliana Lumintang, Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Kemajuan Pembangunan Masyarakat Di Desa Tara-Tara I, *e-journal acta diurna* Vol. 4 No.2. Tahun 2015.
- Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta, 2007, Pustaka Belajar), cet v.
- Mandy Macdonald, dkk. *Gender Dan Perubahan Organisasi Menjembatangi Kesenjangan Antara Kebijakan Dan Pratik*, INSIT Juli 1999.

- Munggi Anggraeni Lestari, Partisipasi Perempuan Dalam Proses Pemberdayaan Melalui PNPM Mandiri Perkotaan: Studi Kasus Di Desa Tanjungkarang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus).
- Mahmuddin, Tuha Peut Perempuan : Peluang Dan Diferensiasi Sosial Pembangunan Gampong Di Aceh, Jurnal Perawi. Vol 1, Tahun 2019.
- Nellis Mardhiah, Identifikasi Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Desa Kabupaten Aceh Barat, Jurnal Publik Policy.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Rini Rinawati, Kajian Gender Mengenai Partisipasi Wanita Dalam Pembangunan Partisipatif Melalui Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Sosial Dan Pembangunan Vol. 9 No. 3 (2004).
- Ratih Probosiwi, Perempuan Dan Perannya Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Women And Its Role On Social Welfare Development), Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol. 3, No 1 (2015).
- Surojo Wignjodipuro, Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat (Jakarta: Gunung Agung, 1995).
- Titi Darmi, Optimalisasi Peran Perempuan Berbasis Modal Sosial Pada Sektor Pemerintahan Desa (Study Pada Pengelolaan Dana Desa), Jurnal Antropologi, Vol. 18 No. 1 (2016).
- Tuti Kurniati, Peran Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan batu Selatan, <http://repository.uinsu.ac.id/> (2018).
- Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak, Gender And Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik, Jurnal Studi Gender, Vol.12 No. 3 (2017).